

RENCANA KERJA TAHUN 2023

BIRO ORGANISASI



SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Rencana Strategis Biro Organisasi Tahun 2021 – 2026. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian visi dan misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kinerja Tahun 2023 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Rencana Kinerja 2023 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021 – 2026 Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Di sisi lain, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang direncanakan selama Tahun 2022. Hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

KEPALA BIRO,

Dto

OTIN SUPANDI, S. Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620215 198503 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO ORGANISASI TAHUN LALU	4
2.1. Analis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	4
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	21
2.3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BIRO ORGANISASI	42
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Organisasi	42
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 BIRO ORGANISASI	43
BAB V PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategik tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan stratejik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka pembangunan berupa regulasi dan kerangka anggaran. Sedangkan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Biro Organisasi untuk periode Tahun Anggaran 2023.

Renja Biro Organisasi tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan selama Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada 3 (tiga) Bagian di Biro Organisasi. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan kegiatan atau program karena adanya kebijakan dari pemerintah.

Biro Organisasi sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Sesuai dengan Pergub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Biro Organisasi Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah Provinsi Jambi, khususnya pada Tahun 2023.

Sedangkan tujuannya adalah agar dapat disinkronkan dengan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jambi sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Biro Organisasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja Biro, proses penyusunan Renja Biro dan mengemukakan keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD dan Renstra, serta penjelasan tentang peraturan daerah yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi Biro organisasi.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, ketentuan peraturan lainnya untuk memuat penjelasan dalam pembuatan Renja Biro Organisasi. Sistematika Penulisan, menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Biro Organisasi serta garis besar isi dokumen.

BAB II: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Organisasi Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu kepada APBD tahun berjalan, Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Renstra Biro Organisasi berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun-tahun sebelumnya.

BAB III: Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi

Bab ini menjabarkan tentang tujuan untuk mencapai visi misi Biro Organisasi berserta sasaran yang ditetapkan Biro Organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi

Bab ini menjelaskan tentang perkiraan rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 sesuai dengan peme 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Analis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Biro Organisasi dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian, yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi Biro Organisasi terdiri dari :

- 1) Kepala Biro;
- 2) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan Provinsi;
 - b) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
 - c) Subbagian Analisis Jabatan.
- 3) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
 - a) Subbagian Reformasi Birokrasi;
 - b) Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c) Subbagian Budaya Kerja.
- 4) Bagian Tatalaksana, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mengkoordinasikan tiga subbagian:

1. Subbagian Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas:
 - menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
 - menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
 - menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
 - melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan,

peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

- menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- menyiapkan fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
- menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan;
- menyusun analisis beban kerja berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;
- menyiapkan koordinasi program penyusunan formasi pegawai dan peta jabatan;
- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;
- mengumpulkan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan pemanfaatan hasil analisis jabatan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan analisis beban kerja, informasi pegawai dan peta jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- membina penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota;
- membina penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mengkoordinasikan tiga subbagian:

1. Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:
 - mengkaji dan analisis peningkatan kerja berdasarkan indikator dan 8 (delapan) area perubahan (manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik);
 - mengoordinasikan peningkatan kinerja berdasarkan indikator 8 (delapan) area perubahan;
 - membina terhadap 8 (delapan) kelompok kerja area perubahan pada pemerintah Provinsi pemerintah Kabupaten/Kota dan;
 - melaksanakan fasilitasi dalam verifikasi penilaian peningkatan kinerja 8 (delapan) area perubahan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Subbagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas:
 - mengkaji dan analisis di bidang akuntabilitas kinerja;
 - menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas kinerja;
 - melaksanakan monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sakip Kabupaten/Kota;
 - menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Subbagian Budaya Kerja mempunyai tugas:
 - melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan budaya kerja;
 - menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja;
 - melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan budaya kerja;

- memverifikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Tatalaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya

Bagian Tatalaksana mengkoordinasikan tiga subbagian:

1. Subbagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai tugas:
 - melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya
2. Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas:
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
 - menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
 - menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan Daerah;
 - menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pelayanan publik;
 - mengkaji dan analisis pelaksanaan pelayanan publik;
 - mengelola pengaduan pelayanan publik untuk diproses lebih lanjut;
 - menyusun standar pelayanan internal dan pelayanan publik;

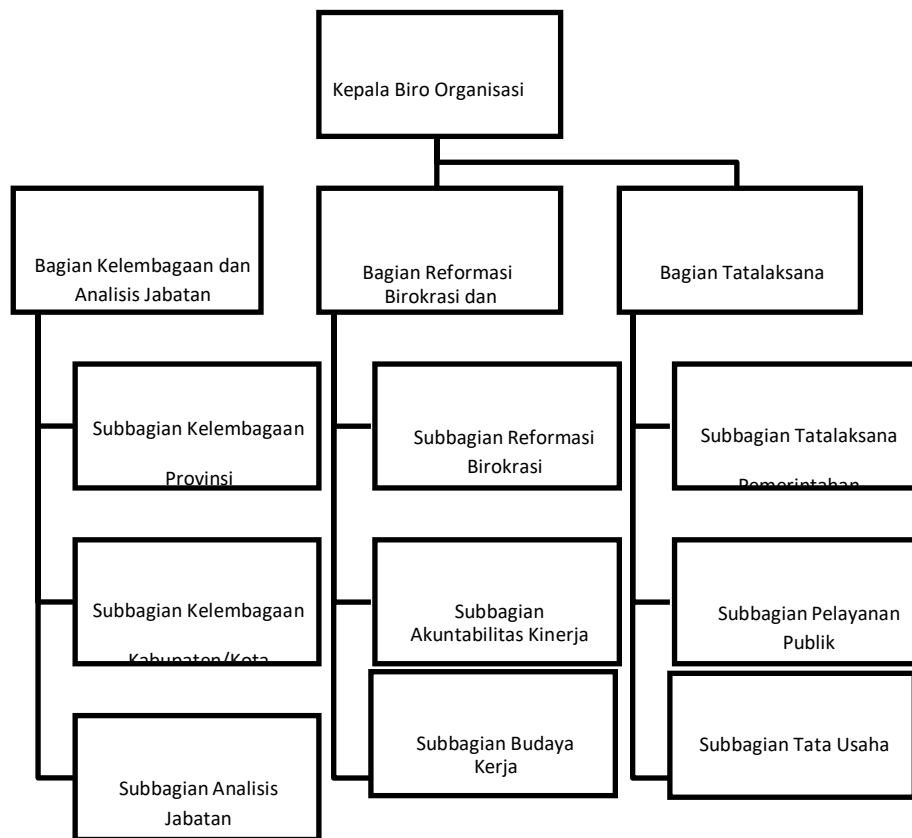
- mengoordinasikan pelayanan dasar;
- melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan Daerah;
- melaksanakan monitoring di bidang pelayanan publik; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
- melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

Susunan organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Biro Organisasi

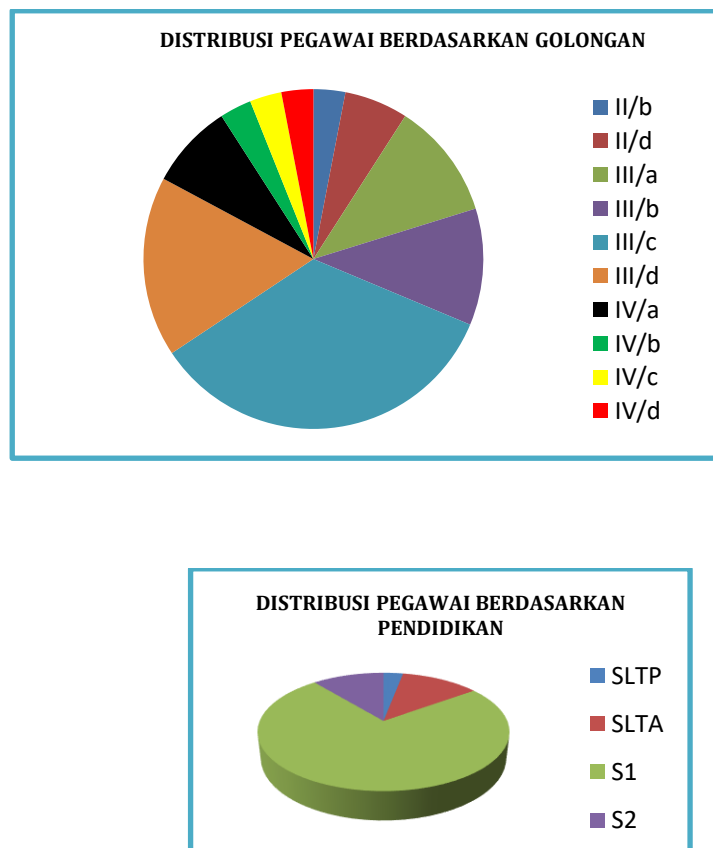


2.1.2 Sumber Daya Biro Organisasi

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 35 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian 60 persen ASN laki-laki atau 21 orang dan 40 persen ASN perempuan atau sebanyak 14 orang. ASN Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 26 orang dan Golongan II sebanyak 3 orang. Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 26 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 4 orang dan SLTP 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi cukup baik. Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Perimbangan gender relatif berimbang pada hampir semua jenjang pendidikan. Rincian lebih lengkap tentang data kepegawaian pada Gambar 2.2.

Gambar 2.1.2.1 Distribusi Pegawai Biro Organisasi



Perkiraan kebutuhan jabatan pelaksana Biro Organisasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi No:1402/KEP.GUB/SETDA.ORG-1.2/2018 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sejumlah 30 orang. Kondisi sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 Biro Organisasi memiliki 18 orang pelaksana, sehingga kekurangan sebanyak 12 orang. Untuk mengatasi kendala tersebut setiap tahun Biro Organisasi mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu adanya penambahan pegawai, sampai saat ini, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi mengoptimalkan tenaga non PNS yang penempatannya disesuaikan dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.

2.1.2.2 Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil dan kinerja Perangkat Daerah. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diikuti dengan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baik. Inventarisasi barang atau aset SKPD dilaksanakan dengan kartu inventaris barang, rekapitulasi aset tetap di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 dituangkan dalam Tabel 2.1.

Gambar 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

No	Klasifikasi	JumlahBarang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		870.154.615
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	283 unit	856.234.615
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	6 unit	11.320.000
3	Alat-alat Kedokteran	2 unit	2.600.000
1	Aset Tetap LainnyaBuku Perpustakaan		174.245.714
		1.567 buku	174.245.714
	Jumlah		1.044.400.329

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Biro Organisasi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.1.2.3 Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif. Biro Organisasi perlu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks pengembangan informasi tersebut, Biro Organisasi membangun sebuah sistem informasi dalam hal pelayanan administrasi data kepegawaian sehingga data kepegawaian menjadi lebih tertib, tidak ada lagi berkas kepegawaian yang menumpuk diruangan, proses kepengurusan pangkat

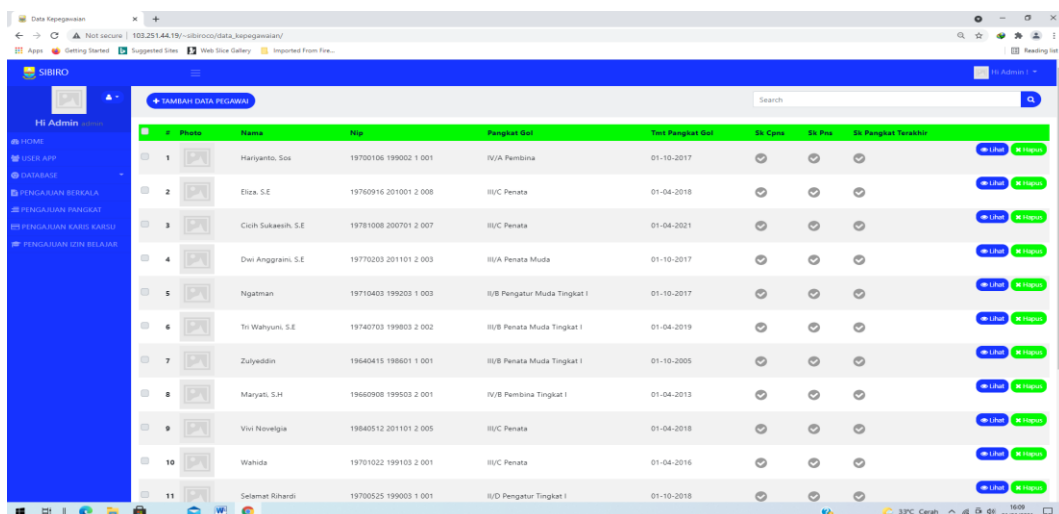
dan berkala pegawai sesuai dengan waktunya, mudah dalam pencarian informasi data pegawai hingga tidak terjadi kelebihan/kekurangan pembayaran tunjangan akibat belum dilakukannya pemuktahiran data.

2.1.2.4 Aplikasi SIBIRIO

Sistem Informasi Kepegawaian dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penyediaan informasi yang akurat dan efisien, sehingga pengambilan keputusan dapat secara obyektif dilakukan. Secara strategis pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian merupakan salah satu sistem yang bergerak dibidang kepegawaian dan mampu menumbuhkan pengetahuan, memelihara, memperkaya dan menyediakan pengetahuan di bidang kepegawaian kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat pada saat yang tepat. Sistem informasi kepegawaian yang diselenggarakan secara cepat, tepat dan akurat ditujukan untuk mendukung kebijaksanaan Pegawai Negeri Sipil, terutama di dalam mendukung kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Transformasi tata kelola data kepegawaian secara elektronik sudah menjadi sebuah keharusan. Agar dapat memberikan keuntungan dan kemudahan dalam layanan data kepegawaian. Data kepegawaian yang selama ini banyak menggunakan berkas fisik dalam bentuk kertas perlu ditransformasi menjadi data digital. Sehingga layanan pengelolaan data kepegawaian juga dapat dilakukan secara digital

Aplikasi SIBIRIO merupakan sebuah upaya dalam rangka memberikan pelayanan melalui bantuan teknologi yang mumpuni, dengan Sistem Informasi ini, proses pengelolaan administrasi kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat menyajikan data dan informasi kepegawaian yang cepat, akurat dan *uptodate* dapat menjadi bahan pertimbangan atau rujukan dalam pembuatan kebijakan di bidang kepegawaian.



The screenshot shows the SIBIRIO web application interface. On the left is a blue sidebar with navigation links. The main area displays a table of employee data with columns for ID, Photo, Name, NIP, Pangkat Gol, Tmt Pangkat Gol, and three checkboxes (Da. Cptn, Da. Pns, Da. Pangkat Terakhir). Each row has 'Lihat' and 'Hapus' buttons. The table lists 11 employees.

ID	Photo	Nama	NIP	Pangkat Gol	Tmt Pangkat Gol	Da. Cptn	Da. Pns	Da. Pangkat Terakhir
1		Haryanto, Sos	19700106 199002 1 001	IV/A Pembina	01-10-2017	☒	☒	☒
2		Elica, S.E	19760916 201001 2 008	III/C Penata	01-04-2018	☒	☒	☒
3		Cich Sukasari, S.E	19781008 200701 2 007	III/C Penata	01-04-2021	☒	☒	☒
4		Dwi Anggrani, S.E	19770203 201101 2 003	III/A Penata Muda	01-10-2017	☒	☒	☒
5		Ngatman	19710403 199203 1 003	II/B Pengatur Muda Tingkat I	01-10-2017	☒	☒	☒
6		Tri Wahyuni, S.E	19740703 199803 2 002	II/B Penata Muda Tingkat I	01-04-2019	☒	☒	☒
7		Zulyeldin	19640415 198601 1 001	II/B Penata Muda Tingkat I	01-10-2005	☒	☒	☒
8		Maryati, S.H	19660908 199503 2 001	IV/B Pembina Tingkat I	01-04-2013	☒	☒	☒
9		Vivi Naveilga	19840512 201101 2 005	III/C Penata	01-04-2018	☒	☒	☒
10		Wahida	19701022 199103 2 001	III/C Penata	01-04-2016	☒	☒	☒
11		Selamat Rihardi	19700525 199003 1 001	II/D Pengatur Tingkat I	01-10-2018	☒	☒	☒

Gambar 2.1.2.4 Aplikasi SIBIRIO

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Penyelenggaraan pelayanan Biro Organisasi berdasarkan pada Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

Kinerja pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi periode Tahun 2016 – 2021 dijelaskan dalam Tabel 2.1.3

Tabel 2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Renstra Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi	96%	61%	70%	78%	87%	96%	61%	70%	78%	87%	96%	100	100	100	100	100
2	IKM Provinsi Jambi	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	100	100	100	100	100
3	Skor PMPRB Pemerintah Provinsi Jambi	62,79	54,79	56,79	58,79	60,79	62,79	54,79	56,79	58,79	70	71,28	100	100	100	115	113
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi	BB	CC	CC	CC	B	BB	CC	CC	CC	CC	B	100	100	100	85	83

Tabel di atas menunjukkan rata-rata rasio capaian pada tahun ke-5 menunjukkan angka yang baik, hanya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi yang belum memenuhi target capaian kinerja. Secara spesifik, masih terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai, antara lain:

- a. Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
- b. Penjabaran kinerja yang disusun belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan kausalitas, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih difokuskan pada urusan dan belum melihat hubungan lintas fungsi antar OPD, sehingga menghambat tercapainya kinerja secara menyeluruh;
- c. Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum sepenuhnya terlihat adanya keterlibatan pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan;
- d. Belum seluruh pimpinan OPD berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- e. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
- f. Inspektorat telah melakukan evaluasi internal SAKIP terhadap OPD, namun hasil evaluasi tersebut belum mampu mendorong perbaikan yang signifikan pada penerapan akuntabilitas kinerja; dan
- g. Rendahnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi, antara lain:

1. Melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pada kerangka logis yang telah disusun sampai ke level individu;
2. Memastikan terciptanya keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja, serta melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah

dilakukan;

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan,
4. keuangan, dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;
6. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Aspek keterwadahan urusan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi telah memenuhi 100%. Hal tersebut adalah dengan terwadahnya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, sesuai dengan Lampiran Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang - Undang tersebut telah terinci semua urusan, mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Juga urusan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang diterbitkan pada tahun 2016. Selain itu, untuk menyempurnakan rincian tugas dan fungsi, perubahan atas beberapa Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah telah dilakukan pada tahun 2017.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi secara mandiri yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tujuan dari dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan. Upaya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi untuk mencapai target indikator tersebut adalah dengan melakukan pendampingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pendampingan dimaksud dalam rangka mendorong dan memotivasi unit pelayanan masyarakat agar selalu menjaga dan meningkatkan fungsi dan kinerja pelayanan kepada masyarakat sehingga secara bertahap dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan.

Pada tahun 2020 dilaksanakan survey IKM secara mandiri oleh 43 unit pelayanan di Pemerintah Provinsi Jambi dengan seluruh unit pelayanan telah melaporkan hasilnya. Dari 43 unit pelayanan yang telah melaporkan hasil survey IKM tersebut, 35 unit layanan mendapatkan skor atau nilai IKM dengan kriteria baik. Sementara itu terdapat 8 unit layanan mendapatkan nilai IKM dengan Kriteria sangat baik.

Sedangkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi selalu mendorong Perangkat

Daerah untuk mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, asessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindak lanjutisecaramaksimal

Alokasi anggaran yang dibebankan pada masing-masing program untuk pencapaian kinerja layanan serta serapannya ditunjukkan pada Tabel 2.1.3.2 Berikut:

Tabel 2.1.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke				
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja	2.989	2.924	2.900	3.044	1.292	2.914	2.874	2.397	3.002	1.292	2,51	0,02	17,33	1,36	0,01
Belanja Langsung	680	658	581	92	72	680	658	581	92	72	100	100	100	100	100
Belanja Tidak langsung	2.308	2.265	2.318	2.951	1.220	2.234	2.215	1.815	2.910	1.220	2,51	0,02	17,33	1,36	0,01

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Biro Organisasi Sekretariat daerah Provinsi Jambi Tahun 2021

Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
1	2	3	4
Belanja Operasi	1.712.762.000	1.660.134.266	96.92

Tabel 2.1.3.2 menunjukkan adanya fluktuasi anggaran dari tahun ke tahun. Efisiensi anggaran dapat dicapai dengan adanya beberapa faktor pendukung sebagai berikut :

1. Komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan;
2. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang aparatur pemerintah dewasa ini adalah dalam upaya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan dan kepuasan penerima pelayanan atau masyarakat. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- 1) perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur telah melahirkan isu-isu strategis yang harus direspons dan diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran organisasi;
- 2) kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3) reformasi birokrasi yang ditetapkan Pemerintah untuk dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan rumusan konsep arah dan strategi reformasi birokrasi dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi. Road map tersebut diharapkan dapat mendeksripsikan arah perubahan kedalam delapan area perubahan yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Selanjutnya koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi.

Peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut:

- 1) kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan dan pelaksanaan analisis jabatan sebagai kerangka dasar dalam penataan sumber daya aparatur merupakan suatu peluang besar bagi Biro Organisasi untuk dapat memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- 2) dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi sebagai penyusun bahan kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah, penataan
- 3) ketatalaksanaan dan penataan kebijakan SDM aparatur sangat mempengaruhi optimalisasi capaian target kinerja.

- 4) ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi yang memadai mendukung penguatan tugas dan fungsi Biro Organisasi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Biro Organisasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Biro Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Organisasi, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Realisasi program/kegiatan Biro Organisasi yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Melalui pelaksanaan 2 (dua) program prioritas yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

Secara umum program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi di bidang perencanaan Kepegawaian dan Keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan langkah penataan administrasi tatausaha yang lebih efektif dan efisien serta sistematis dalam rangka terpenuhinya kebutuhan administrasi dan peralatan di Biro Organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dari tahun 2021 s.d. 2026 melalui APBD Provinsi Jambi, Biro Organisasi diberikan anggaran yang relatif memadai dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selain itu, outcome yang telah dicapai dari program ini adalah terlayannya kebutuhan pelayanan administrasi umum dengan rata-rata sebesar 98 persen yang didukung oleh output laporan akuntabilitas kinerja Biro dan survei indeks kepuasan masyarakat Biro, kegiatan yang dihasilkan adalah laporan akuntabilitas Biro yang akuntabel, pelayanan pendukung kinerja melalui pemenuhan sarana prasarana kerja, pemeliharaan alat kantor, terinventarisirnya data PNS di lingkup Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi baik kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat fungsional teknis, kenaikan gaji berkala, pensiun, izin belajar/tugas belajar, mutasi pegawai, kepengurusan KARIS/KARSU, dan Karpeg.

Sebagai upaya pencapaian kinerja tersebut, tentunya juga mengalami beberapa kendala mendasar. Salah satunya pelayanan administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala tersebut dilakukan satu pintu yakni melalui Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Namun kenyataannya masih banyak diantara PNS yang melakukan proses layanan tersebut langsung ke BKD Provinsi Jambi dan tidak melalui Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi. Selain itu, masih minimnya motivasi PNS lingkup Biro Organisasi yang ingin mengurus gaji berkala, dengan berbagai alasan seperti lupa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ke depan perlu dibuat sebuah sistem yang dapat menjangkau layanan secara terpadu.

Program ini juga memberikan output terpenuhinya kebutuhan administrasi dan peralatan kepegawaian setda melalui pembelian ATK, belanja cetak, belanja modal, dan perjalanan dinas.

Dari 2 (dua) output kegiatan yang dilaksanakan, pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Biro Organisasi dengan SKPD terkait serta lemahnya SDM yang menangani bidang ini. Namun secara keseluruhan, program ini tidak mendapat halangan yang berarti, karena hanya merupakan kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan administrasi pelayanan aparatur baik lingkup Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi maupun aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi. Tetapi untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi aparatur lingkup setda terkait dengan kepengurusan administrasi kepegawaian, untuk tahun mendatang perlu difasilitasi dengan penggunaan sistem berbasis IT. Sehingga seluruh proses administrasi kepegawaian dapat terdata dengan baik.

2. Program Penataan Organisasi

Program Penataan Organisasi terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan beberapa sub kegiatan strategis, yakni :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi bertujuan mewujudkan tertib penataan kelembagaan di Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun output yang diharapkan adalah terlaksananya evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/B lingkup Provinsi Jambi dengan tujuan untuk menciptakan perangkat daerah unit pelaksana teknis daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dalam pelaksanaannya, selama tahun 2022 Biro Organisasi telah melaksanakan evaluasi terhadap 8 perangkat daerah dan 8 UPTD/B di lingkup Provinsi Jambi.

2. Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Kab/ Kota.

Untuk mendukung kegiatan fasilitasi kelembagaan kab/kota di bidang pembinaan dan fasilitasi organisasi, kelembagaan dan peraturan daerah

dilakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan evaluasi serta kegiatan pembinaan dan rakor perangkat daerah 11 (sebelas) kab/kota dalam Provinsi Jambi.

3. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012, Analisis Jabatan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pengumpulan data;
- c. Pengolahan data;
- d. Verifikasi;
- e. Penyempurnaan; dan
- f. Penetapan hasil analisis jabatan.

Hasil analisis jabatan merupakan informasi jabatan yang terdiri dari Uraian Jabatan dan Peta Jabatan. Uraian jabatan meliputi:

- a. Identitas jabatan;
- b. Ringkasan tugas jabatan;
- c. Rincian tugas jabatan;
- d. Wewenang;
- e. Tanggung jawab;
- f. Hasil kerja;
- g. Bahan kerja;
- h. Perangkat kerja;
- i. Hubungan jabatan;
- j. Keadaan tempat kerja;
- k. Upaya fisik;
- l. Kemungkinan resiko bahaya; dan
- m. Syarat jabatan.

Hasil Analisa Jabatan dipergunakan untuk pembinaan dan penataan Kelembagaan; Kepegawaian; Ketatalaksanaan; dan Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Hasil analisis jabatan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil analisis jabatan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, sedangkan hasil analisis jabatan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.

Analisis Beban Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu :

- a. Norma waktu (variabel tetap) merupakan waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas/kegiatan.
- b. Norma waktu (variabel tetap) ditetapkan dalam standar norma waktu kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.
- c. Volume kerja (variabel tidak tetap) diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja.
- d. Jam kerja efektif merupakan alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja.

- e. Analisis beban kerja menggunakan metoda membandingkan beban kerja dengan jam kerja efektif per tahun.
- f. Beban kerja diperoleh dari hasil perkalian antara volume kerja dengan norma waktu

Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penelaahan hasil olahan data; dan
- d. penetapan hasil analisis beban kerja.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Formulir Isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan; wawancara; pengamatan langsung; dan referensi.

Hasil analisis beban kerja di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah diusulkan validasi ke Menteri Dalam Negeri melalui surat Gubernur Jambi Nomor S-061/3856/SETDA.ORG-1.2/XI/2019 tanggal 2 November 2019 dan surat nomor S-061/531/SETDA.ORG-1.2/II/2020 tanggal 18 Februari 2020. Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 061/1598/SJ tanggal 19 Februari 2020 memberikan pernyataan telah divalidasinya dokumen anjab dan ABK Pemerintah Provinsi Jambi.

Evaluasi Jabatan

Gubernur Jambi melalui surat Nomor S-061/2025/SETDA.ORG-1.2/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 mengajukan usul persetujuan hasil evaluasi jabatan Pemerintah Provinsi Jambi ke Menteri PAN dan RB.

Menteri PAN dan RB melalui surat Nomor B/228/M.SM.04.00/2020 tanggal 24 Februari 2020 memberikan persetujuan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kelas Jabatan Pemerintah Provinsi Jambi

Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Ada 8 area perubahan yang menjadi prioritas Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi, yakni : (1) area perubahan kelembagaan ; (2) area perubahan Tatalaksana ; (3) area perubahan penataan peraturan perundang-undangan ; (4) area perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur ; (5) area perubahan Penguatan Pengawasan ; (6) area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja ; (7) area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ; (8) area perubahan Pola Pikir (*mindset*) dan Budaya Kerja Aparatur (*cultureset*).

Kegiatan pelaksanaan, monitoring & evaluasi reformasi birokrasi pemerintah provinsi Jambi memfokuskan pada 8 area perubahan yang diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan pencapaian arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi dan arah yang telah disepakati;
- b. Mewujudkan model manajemen pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan menekankan pada efisiensi, efektifitas, dan keadilan;
- c. Mewujudkan sosok aparatur Negara yang professional, bersih dari praktek KKN, dan berintegritas tinggi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparatur Negara yang kompeten dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan tersentralisasi;
- d. Ketersediaan ruang bagi *stakeholder* untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima melalui perkonsultasian dan advokasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat dan bermanfaat;
- e. Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang *exelence*.

1. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020. Dari hasil evaluasi tersebut, provinsi jambi masih pada posisi kategori “B”,

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi di pemerintah provinsi Jambi Tahun 2021 adalah 62,74 dengan kategori “B”
- b. Hasil evaluasi Tahun sebelumnya dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jambi, sehingga belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan reformasi Birokrasi.
- c. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program RB adalah:
 - 1) Pelaksanaan RB cenderung bersifat administratif, hal ini dikarenakan manajemen pelaksanaan RB mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi program-program RB belum dilakukan secara baik. Selain itu pelaksanaan RB pada tingkat OPD masih jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan dengan tingkat pemerintah daerah;
 - 2) Degulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga upaya yang dilakukan cenderung administratif, belum diarahkan untuk melakukan revisi- revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi;

Pada tahun 2022 Provinsi Jambi kembali dilakukan evaluasi oleh Kemenpan RB yang bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam

rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas. Untuk hasil tersebut akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada Tahun berikutnya.

2. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi adalah Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh SKPD Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi berupa asistensi langsung terhadap SAKIP instansi pemerintah dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB, dengan tujuan memberikan informasi dan pengetahuan untuk penyempurnaan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih optimal dan memperoleh penilaian yang lebih baik pada saat evaluasi dilaksanakan. Diharapkan pada Tahun 2022 nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh predikat “BB”.

Guna melakukan penguatan terhadap Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Jambi, dilakukan Penyusunan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, yang merupakan salah satu point penilaian oleh Kementerian PAN dan RB pada penilaian Evaluasi LKJ Pemerintah Provinsi Jambi, disamping dapat memberikan pedoman bagi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi guna lebih mengoptimalkan pada saat implementasi anggaran dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 telah dilakukan evaluasi oleh Evaluator dari Kementerian PAN dan RB. Hasil penilaian LKj Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan nilai B dengan skor 64,08 atau meningkat 2,08 dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2021 belum sepenuhnya ditindaklanjuti, sehingga belum terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan, kelemahan yang masih dijumpai antara lain:

- a. Pemahaman dan keterlibatan pimpinan masih sangat minim (cenderung baca text, tanya jawab ngga paham, kelihatan ngga terlibat membangun sistem dan manage kinerjanya).
- b. Monev berkala ada, data ada, isian aplikasi ada, tapi kualitas belum, kelihatan monevnya blm "dimanfaatkan" untuk strategi manajemen kinerja, "brus pemenuhan" dokumen/data.

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai Leading Sektor dalam penguatan maupun pembinaan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jambi, Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota sebagai upaya peningkatan Pelayanan Publik pada setiap tahunnya.

Sebagai dasar ataupun regulasi dari pelaksanaan Pelayanan Publik yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana di dalam undang-undang tersebut mengamanatkan kepada Gubernur pada tingkat Provinsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik guna tercapainya peningkatan terhadap efisiensi dan efektifitas serta kualitas pada Pelayanan Publik.

Upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperbaiki penerapan pemenuhan Standar Pelayanan Publik telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan pembinaan dan asistensi pemenuhan standar komponen pelayanan kepada OPD lingkup Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jambi, di Tahun 2020 yaitu 83,09 dan di Tahun 2021 mendapatkan nilai 87,09 atau meningkat sebesar 4 indeks.

TABEL 2.1											
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIROO ORGANISASI S/D TAHUN 2022											
PROVINSI JAMBI											
BIRO ORGANISASI											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai	0	61,35	BB	0	0	0	0	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro	Indeks	88.7	0	0	0	0	88,60	88,60	1
4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome : Lakip Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pencapaian Kinerja yang	Nilai	0	100	64,50	77,82	77,82	0	0	0

			akuntabel									
			Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB	B	0	0	0	BB	BB	BB
4.01.01.1.01.0 1	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra/Renja tersusun	Dok	0	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.01.1.01.0 2	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA tersusun	Dok	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dok	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.01.1.01.0 4	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA tersusun	Dok	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dok	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.01.1.01.0 6	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ/LKJ tersusun	Dok	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	2	0	0	0	0	2	2	1
4.01.01.1.06.0 7	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi tersusun	Dok	-	0	1	1	1	0	1	0
			Monev Kinerja sub kegiatan	Kegiatan	-	0	18	18	1	0	18	0
			Frekuensi rapat internal evaluasi kinerja Biro	Kali	-	0	4	4	1	0	4	0

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1	1
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Outcome : Indeks Kepuasan Layanan Biro Organisasi Output : Jumlah Pelayanan yang difasilitasi	Nilai	-	83,90	89,90	87,63	87,63	0	0	0
			Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Biro	Persentase	100	-	-	-	-	100	100	1
4.01.01.1.06.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Unit	-	0	54	100	2	0	100	0
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.01.1.06.03	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Item	-	0	21	43	2	0	43	0
			Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.01.1.06.05	3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	-	0	2	100	50	0	100	0
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	0	0	0	0	2	2	1
4.01.01.1.06.09	4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	Kegiatan	-	0	32	100	3	0	100	0
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	50	0	0	0	0	40	40	1

4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Outcome : Indeks Kepuasan Layanan Biro Organisasi Output : Jumlah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	Nilai Unit	-	0	89,50	89,50	89,50	0	0	0
			Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Kantor	Persentase	100.0	0	0	0	#DIV/0! !	100.0	100	1
4.01.01.1.08.03	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Unit	-	0	95	73	1	0	73	0
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Lap	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		SKOR PMPRB PROVINSI JAMBI	Skor	62,80	60,28	60,80	0	0	61,50	61,51	0
4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Outcome : Indeks Tingkat Kematangan Kelembagaan Daerah Output : Pemenuhan terhadap 11 indikator tingkat kematangan organisasi sesuai dengan Permendagri No 99 Tahun 2018	Skor Persen	-	0	45	28,1	28,1	0	0	0
			Nilai Tingkat Kematangan Kelembagaan PD Provinsi	Nilai	1376	0	0	0	0	1290	1290	1
			Persentase Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan	Persentase	100.0	0	0	0	0	100.0	100	1
			Indeks Tingkat Efisiensi Unit dan Persentase Unit Pemerintah Prov.Jambi	Indeks	1,4	0	0	0	0	1,3	0	0

4.01.02.1.01.0 1	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah buku gambaran kelembagaan PD Pemprov Jambi	Buku	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah pelaksanaan rakor penyederhanaan birokrasi	Kali	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah Perangkat Daerah Pemprov Jambi yang tertata kelembagaannya	PD	-	0	8	8	1	0	8	0
			Jumlah Rakor Penataan UPTD Berdasarkan Permendagri No 99 Tahun 2018	Kali	-	0	1	0	0	0	0	0
			Jumlah UPTD Pemprov Jambi yang terevaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	UPTD	-	0	8	8	1	0	8	0
			Jumlah Dokumen hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Dok	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.02.1.01.0 2	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kot a	Hasil penilaian dan pemberian penghargaan penataan kelembagaan Kab/Kota	Dok	-	0	1	0	0	0	0	0
			Jumlah Kab/Kota yang dibina	Kab/Kot a	-	0	11	11	1	0	11	0
			Jumlah Pelaksanaan Rakor Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Kali	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah Pelaksanaan Workshop Kelembagaan UPTD Bidang Pertanian Kab/Kota	Kali	-	0	1	0	0	0	0	0
			Jumlah Pelaksanaan Workshop Penilaian Penghargaan Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Kali	-	0	1	0	0	0	0	0
			Jumlah Pemberian Penghargaan Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Kali	-	0	1	0	0	0	0	0

			Persentase Fasilitas Raperbup/Raperwal/Perbup/Perwali yang dievaluasi	Persentase	-	0	100	100	1	0	100	0
			Persentase Raperda yang dievaluasi	Persentase	-	0	100	100	1	0	100	0
			Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Dok	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.02.1.01.03	3	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Anjab, ABK, Evjab dan SKJ	Kali	-	0	3	3	1	0	3	0
			Frekuensi pelaksanaan monev penyusunan Anjab, ABK dan Evjab Pemerintah Kab/Kota	Kab/Kota	-	0	11	11	1	0	11	0
			Indeks tingkat efisiensi dan prestasi unit Pemprov Jambi	Indeks	-	0	1.2	1	1	0	1	0
			Jumlah dokumen Anjab dan ABK hasil penataan kelembagaan Perangkat Daerah Pemprov Jambi	Dok	-	0	13	0	0	0	0	0
			Jumlah dokumen Evjab hasil penataan kelembagaan Perangkat Daerah Pemprov Jambi	Dok	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah fasilitas penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil penataan kelembagaan Perangkat Daerah Pemprov Jambi	PD	-	0	13	13	1	0	13	0
			Jumlah fasilitas penyusunan SKJ Administrator Pemprov Jambi	Jabatan	-	0	241	0	0	0	0	0
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dok	1	0	0	0	0	1	1	1

4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Outcome : Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi Output : Persentase pemenuhan komponen penilaian mandiri Reformasi Birokrasi sesuai Permenpan No 26 Tahun 2020	Nilai	-	0	61,10	0	0	0	0	0
			Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Predikat Reformasi Birokrasi "B"	Persentase	27	0	0	0	0	18	18	1
			Persentase PD Pemprov dengan Predikat Akuntabilitas ≥B	Persentase	27,90	0	0	0	0	23,25	0	0
			Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Predikat Akuntabilitas ≥B	Persentase	81,81	0	0	0	0	81,81	0	0
			Persentase PD yang menerapkan Budaya Kerja	Persentase	46	0	0	0	0	34	34	1
			Persentase Pemerintah Kab/Kota yang memiliki kebijakan Budaya Kerja	Persentase	18	0	0	0	0	9%	0	0
			Persentase PD yang memiliki Peta Proses Bisnis	Persentase	44	0	0	0	0	23	23	1
			Persentase PD yang mengimplementasikan SOP	Persentase	44	0	0	0	0	23%	0	0
			Persentase PD dengan IKM kategori "A"	Persentase	20	0	0	0	0	18%	0	0
			Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan IKM kategori "B"	Persentase	27	0	0	0	0	18%	0	0
4.01.02.1.02.01	1	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan	Frekuensi pelaksanaan koordinasi/konsultasi/asistensi/stu di RB Pemprov Jambi	Kali	-	0	6	6	1	0	6	0

		Reformasi Birokrasi	Jumlah monitoring percepatan RB Pemprov Jambi	Kali	-	0	2	2	1	0	2	0
			Jumlah Pembinaan dan Monitoring penguatan RB Pemerintah Kab/Kota	Kab/Kota	-	0	11	11	1	0	11	0
			Persentase Kab/Kota yang mendapat predikat RB "B"	Persentase	-	0	18	18	1	0	18	0
			Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi	Indeks	-	0	61	0	0	0	0	0
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dok	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.02.1.02.02	2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Frekuensi monev capaian kinerja Perangkat Daerah per-triwulan	Kali	-	0	4	4	1	0	4	0
			Frekuensi pelaksanaan koordinasi/konsultasi/asistensi/studi penguatan SAKIP Pemprov Jambi	Kali	-	0	6	6	1	0	6	0
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemprov Jambi dan Kab/Kota oleh Kementerian PAN dan RB	Kali	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam penguatan SAKIP	Kab/Kota	-	0	11	9	1	0	9	0
			Jumlah laporan kinerja Pemprov Jambi	Lap	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah pelaksanaan coaching penguatan SAKIP Pemerintah Kab/Kota	Kali	-	0	1	0	0	0	0	0
			Jumlah pelaksanaan coaching penguatan SAKIP Perangkat Daerah Pemprov Jambi	Kali	-	0	1	0	0	0	0	0
			Nilai AKIP Pemprov Jambi	Nilai	-	0	70.01	0	0	0	0	0

			Persentase Kab/Kota dengan predikat AKIP "BB"	Persentase	-	0	18.0	0	0	0	0	0
			Persentase Perangkat Daerah Pemprov Jambi dengan predikat AKIP "BB"	Persentase	-	0	23.0	0	0	0	0	0
			Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dok	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.02.1.02.03	3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Coaching Clinic penyusunan nilai dan perilaku budaya kerja lingkup Pemprov. Jambi	PD	-	0	43	43	1	0	43	0
			Jumlah perangkat daerah Provinsi Jambi yang menerapkan budaya kerja	PD	-	0	5	5	1	0	5	0
			Pelaksanaan FGD Budaya Kerja	Kali	-	0	1	0	0	0	0	0
			Sosialisasi pembentukan agen perubahan budaya kerja lingkup Pemerintah Prov. Jambi	PD	-	0	43	43	1	0	43	0
			Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Lap	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.02.1.02.04	4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki peta proses bisnis	PD	-	0	4	0	0	0	0	0
			Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP	PD	-	0	10	10	1	0	10	0
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dok	1	0	0	0	0	1	1	1
4.01.02.1.02.05	5	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Frekuensi monev capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Kali	-	0	4	4	1	0	4	0
			Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kab/Kota	-	0	11	11	1	0	11	0

			Jumlah pelaksanaan sosialisasi inovasi pelayanan publik	Kali	-	0	1	0	0	0	0	0
			Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Kali	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik Perangkat daerah	Kali	-	0	43	43	1	0	43	0
			Jumlah proposal inovasi pelayanan publik	Lap	-	0	15	16	1	0	16	0
			Jumlah Rakor teknis pemenuhan komponen standar pelayanan publik SOP Perangkat daerah	Kali	-	0	1	1	1	0	1	0
			Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dok	1	0	0	0	0	1	1	1

2.3 Permasalahan dan isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pelayanan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Berdasarkan tugas fungsi yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

2.3.1.1 Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- a. Penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) masih memerlukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek struktur, tugas, fungsi, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- b. Penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota masih memerlukan fasilitasi/pendampingan sesuai asas-asas pembentukan perangkat daerah.
- c. Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelembagaan masih memerlukan fasilitasi intensif terkait perencanaan, monitoring dan evaluasi.

2.3.1.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan

- a. Penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa layanan dan memberikan kepastian hukum bagi pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas mereka.
- b. Belum terakomodirnya tisi penyusunan peta proses bisnis dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian Menpan dan RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis.
- c. Kualitas pelayanan publik masih terus memerlukan peningkatan, khususnya terkait dengan penumbuhan inovasi, pengembangan sistem pelayanan dan kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana perlu diperhatikan agar kinerja pegawai mampu meningkatkan mutu kualitas pelayanan yang diberikan.

2.3.1.2 Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

- a. Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART.
- b. Penjabaran kinerja belum menggambarkan hubungan kausalitas dan pemecahan masalah yang dihadapi.
- c. Belum terlihat adanya keterlibatan pimpinan perangkat daerah dalam pengambilan keputusan yang strategis dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan/pemantauan pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Kualitas informasi kinerja dalam laporan kinerja belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya.
- e. Hasil evaluasi Inspektorat atas SAKIP perangkat daerah belum mampu mendorong perbaikan yang signifikan.

- f. Belum optimalnya fungsi Tim RB dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi RB.
- g. Pemahaman, kesadaran dan motivasi PNS untuk mengimplementasikan Budaya Kerja perlu terus ditingkatkan sehingga berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan.

2.3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Gubernur Jambi pada periode 2021-2026 adalah “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT”. Jambi MANTAP dalam visi Gubernur Jambi dijabarkan dalam “Enam Tujuan” yakni:

Jambi Maju

1. suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman,

Jambi Aman

2. tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan masyarakat,

Jambi Nyaman

3. sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja,

Jambi Tertib

4. terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat,

Jambi Amanah

5. membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural,

Jambi Profesional

6. suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Berangkat dari uraian diatas Visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman,

Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT” menjadi arah dari pembangunan Provinsi Jambi dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Provinsi Jambi pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut yang ingin dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang selanjutnya dirumuskan menjadi misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan runag berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai perangkat daerah yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang demokratis melalui kebijakan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan, dengan demikian memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

2.3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Biro Organisasi adalah institusi sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan ketatalaksanaan. Isu strategis banyak berkaitan dengan perubahan tata kelola pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. **Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat**
Dinamika regulasi dan kebijakan Pemerintahan Pusat pasti berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. **Optimalisasi pelayanan publik**
Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan prima oleh tiga pilar penyelenggaraan pelayanan publik (birokrasi, dunia usaha dan masyarakat) semakin meningkat. Seiring dengan harapan tersebut, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk

selalu mengembangkan inovasi pelayanan publik antara lain melalui gerakan *One Agency One Innovation*.

3. Digital Government Services

Model pelayanan berbasis teknologi informasi, berdampak pada perubahan mindset dan perilaku birokrasi dari pelayanan manual kepada pelayanan digital. Proses perubahan dimaksud perlu disertai upaya inisiasi, regulasi dan asistensi penerapan tatalaksana pelayanan internal pemerintah daerah maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

4. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu tugas Biro Organisasi antara lain untuk menyiapkan bahan kebijakan penataan desain struktur tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mendasarkan pada keseimbangan beban kerja sehingga tidak terjadi duplikasi maupun kekosongan penyelenggaraan tugas fungsi. Selain itu terjalannya pola hubungan sinergitas dan mekanisme kerja yang jelas antar perangkat daerah juga menjadi cakupan fungsi dan tugas Biro Organisasi.

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

6. Percepatan Reformasi Birokrasi

Pemerintah mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 terdapat 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang disasar, 5 (lima) di antaranya menjadi cakupan tugas Biro Organisasi, yaitu area perubahan Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM aparatur, Peningkatan Pelayanan Publik serta Penguatan Akuntabilitas.

7. Pengarusutamaan gender

Penerapan pengarusutamaan gender dalam cakupan tugas Biro Organisasi dan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan. Keberpihakan kesetaraan gender pada lima sasaran *affirmative action* yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok tidak mampu/miskin.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO ORGANISASI

Tujuan dan renja biro organisasi

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi selama kurun waktu **1 (satu)** tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Oleh karena itu, tujuan menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Uraian di atas menunjukkan pengertian yang berbeda antara tujuan dan sasaran, namun sering ditempatkan berpasangan. Tujuan ialah pernyataan umum dari apa yang akan diselesaikan, sedangkan sasaran adalah pernyataan detail/jelas bagaimana mencapai tujuan.

Adapun Tujuan dan Indikator yang mengacu pada Renstra Biro Organisasi dari tahun 2021– 2026 kami sampaikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun K e -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menjadi institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi	61,50	62,80	63,10	64,50	65

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

Implementasi yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2023 mencakup 2 (dua) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan.

Program dan kegiatan dalam rencana kerja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. Program Administrasi Umum

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - 5) Evaluasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

II. Program Penataan Organisasi

1. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota; dan
 - 3) Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan
2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja;
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan pelayanan Publik.

DANA INDIKATIF SUMBER DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2023 yang juga diharapkan dapat berlanjut pada Tahun 2024, maka Biro Organisasi telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi dengan total anggaran yang direncanakan pada tahun 2023 ini yaitu sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (Tiga *milyar rupiah*), dan perkiraan maju tahun 2024 sebesar **Rp. 3.425.000.000,-** (Tiga *milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta rupiah*).

Dana tersebut diperuntukkan bagi pencapaian program dan kegiatan rutin dan kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sehingga memberikan kontribusi upaya bagi pencapaian visi, misi dan sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, dengan implementasi yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2023 mencakup 18 sub kegiatan.

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan dana/pagu indikatif, sumber pendanaan pada renja 2023 dan perkiraan target maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan Biro Organisasi 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 terlampir.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2021 - 2026 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara arif untuk diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance* dan *clean government* yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 ini kami sampaikan, dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2021 - 2026 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Akhirnya, semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2023 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

**RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

NAMA SKPD : BIRO ORGANISASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat SAKIP Biro	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	BB	751,000,000	APBD	-	BB	945,000,000
4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Biro	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	77,20	181,000,000	APBD	-	77,35	205,000,000
4.01.01.1.01.01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dok	110,000,000	-	-	1 Dok	120,000,000
4.01.01.1.01.02	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dok	12,000,000	-	-	1 Dok	15,000,000
4.01.01.1.01.04	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 Dok	20,000,000	-	-	1 Dok	25,000,000
4.01.01.1.01.06	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2 Lap	27,000,000	-	-	2 Lap	30,000,000
4.01.01.1.06.07	5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Lap	12,000,000	-	-	1 Lap	15,000,000
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	89,70 Nilai	500,000,000	APBD	-	89,80 Nilai	665,000,000
4.01.01.1.06.02	1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	140,000,000	-	-	1 Paket	170,000,000
4.01.01.1.06.03	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	45,000,000	-	-	1 Paket	60,000,000
4.01.01.1.06.05	3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	65,000,000	-	-	2 Paket	85,000,000
4.01.01.1.06.09	4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	50 Lap	250,000,000	-	-	60 Lap	350,000,000
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	89,70 Nilai	70,000,000	APBD	-	89,80 Nilai	75,000,000
4.01.01.1.08.03	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Lap	70,000,000	-	-	1 Lap	75,000,000
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Skor PMPRB	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	62,80	2,249,000,000	APBD	-	63,10	2,480,000,000

4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Tingkat Kematangan Kelembagaan PD Provinsi	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	1376	364,000,000	APBD	-	1462	400,000,000
		Persentase Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	100%	300,000,000	APBD		100%	350,000,000
		Indeks Tingkat Efisiensi Unit dan Persentasi Unit Pemerintah Prov.Jambi	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	1,4	260,000,000	APBD		1,5	270,000,000
4.01.02.1.01.01	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	-	1 Dok	364,000,000	-	-	1 Dok	400,000,000
4.01.02.1.01.02	2 Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-	1 Dok	300,000,000	-		1 Dok	350,000,000
4.01.02.1.01.03	3 Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	-	1 Dok	260,000,000	-	-	1 Dok	270,000,000
4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Predikat Reformasi Birokrasi "B"	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	27	270,000,000	APBD	-	36	290,000,000
		Persentase PD Pemprov dengan Predikat Akuntabilitas ≥B	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	27,90	360,000,000	APBD	-	32,55	370,000,000
		Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Predikat Akuntabilitas ≥B	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	81,81		APBD	-	90,90	
		Persentase PD yang menerapkan Budaya Kerja	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	46	195,000,000	APBD	-	58	200,000,000
		Persentase Pemerintah Kab/Kota yang memiliki kebijakan Budaya Kerja	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	18		APBD	-	27	
		Persentase PD yang memiliki Peta Proses Bisnis	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	44	190,000,000	APBD	-	62	250,000,000
		Persentase PD yang mengimplementasikan SOP	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	44		APBD	-	62	
		Persentase PD dengan IKM kategori "A"	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	20	310,000,000	APBD	-	25	350,000,000
		Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan IKM kategori "B"	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	27		APBD	-	45	
4.01.02.1.02.01	1 Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	1 Dok	270,000,000	-	-	1 Dok	290,000,000
4.01.02.1.02.02	2 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	1 Dok	360,000,000	-	-	1 Dok	370,000,000
4.01.02.1.02.03	3 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	-	1 Lap	195,000,000	-	-	1 Lap	200,000,000
4.01.02.1.02.04	4 Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	-	1 Dok	190,000,000	-	-	1 Dok	250,000,000
4.01.02.1.02.05	5 Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	-	1 Dok	310,000,000	-	-	1 Dok	350,000,000
TOTAL					3,000,000,000				3,425,000,000